

PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) OLEH SPPG DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KEAMANAN DAN KUALITAS PANGAN

Mahesa Fitrah Ramadhan¹, Matthew Alvaro², Cherish Lovely Rochelle³, Justin Ravel Oktavianus⁴, Maria Dinda Angelina⁵, Muhammad Riszky Naufal Nutriansyah⁶

¹⁻⁶ Kelas X, Pelajaran Sosiologi, Sekolah Menengah Atas Negeri 4, Surabaya, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2026

Revised Oktober 2026

Accepted Oktober 2026

Available Oktober 2026

E-Mail Korespondensi :

ramadhanmahesafitriah@gmail.com.

E-Mail Penulis :

ramadhanmahesafitriah@gmail.com.

justinravel85@gmail.com.

cherishlovely@gmail.com.

mariadindaangelina@gmail.com.

cherishlovely@gmail.com.

samsungga059@gmail.com.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting. Pelaksanaan program ini tidak hanya menekankan pemenuhan kandungan gizi, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap keamanan dan kualitas pangan yang diberikan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting dalam penyediaan dan pendistribusian makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program MBG oleh SPPG, penerapan keamanan pangan, kualitas makanan yang diberikan, tantangan dalam menjaga keamanan dan kualitas pangan, serta tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan studi artikel yang relevan. Data kuesioner dianalisis menggunakan jumlah dan persentase jawaban responden untuk

menggambarkan kecenderungan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG, khususnya mengenai manfaat program, menu dan porsi makanan, kualitas, serta keamanan pangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan MBG oleh SPPG serta menjadi bahan masukan dalam meningkatkan keamanan, kualitas, dan pelaksanaan program agar tujuan pemenuhan gizi penerima manfaat dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Keamanan Pangan; Kualitas Makanan; Makan Bergizi Gratis; Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi; Stunting

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a government program aimed at fulfilling the nutritional needs of beneficiaries while supporting efforts to prevent stunting. The implementation of this program requires not only adequate nutritional content but also proper attention to the safety and quality of the food provided. The Nutrition Fulfillment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) plays an important role in preparing and distributing meals, including the selection of raw materials, food processing, storage, and distribution to beneficiaries. This study aims to examine the implementation of the MBG Program by SPPG, the application of food safety practices, the quality of meals provided, the challenges faced in maintaining food safety and quality, and public responses to the program. This study employs a descriptive quantitative method, with data collected through questionnaires and a review of relevant articles. Questionnaire data were analyzed using the frequency and percentage of respondents' answers to describe public responses to the implementation of the

MBG Program, particularly regarding program benefits, food menus and portions, food quality, and food safety. This study is expected to provide an overview of the implementation of the MBG Program by SPPG and serve as input for improving food safety, food quality, and program implementation so that the nutritional needs of beneficiaries can be fulfilled optimally.

Keywords: Food Safety; Food Quality; Free Nutritious Meal; Nutrition Fulfillment Service Unit; Stunting

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, sekaligus mendukung upaya perbaikan status gizi dan pencegahan masalah gizi kronis. Permasalahan gizi di Indonesia masih berkaitan dengan berbagai faktor pada tingkat individu, keluarga, dan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa kejadian stunting tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik anak, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga serta ketersediaan air, sanitasi, dan higiene di lingkungan tempat tinggal (Mulyaningsih et al., 2021).

Selain itu, kajian sistematis menunjukkan adanya hubungan antara ketahanan pangan rumah tangga dan kejadian stunting pada anak di Indonesia, sehingga peningkatan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi menjadi bagian penting dalam intervensi perbaikan gizi (Dewi et al., 2024).

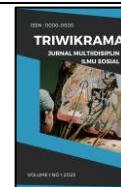
Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program makanan bergizi tidak cukup hanya diukur berdasarkan tersedianya makanan dan kandungan gizinya. Aspek keamanan pangan juga menjadi faktor penting karena makanan yang tidak aman dapat menimbulkan penyakit bawaan pangan dan mengurangi manfaat program bagi penerima. Penelitian mengenai program makan sekolah menunjukkan bahwa keamanan pangan perlu diperhatikan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian. Msimango et al. (2023), misalnya, menemukan adanya kontaminasi mikrobiologis pada bahan pangan segar yang digunakan dalam skema pemberian makanan di sekolah dan menekankan perlunya penguatan praktik keamanan pangan untuk melindungi anak dari risiko penyakit bawaan makanan.

Risiko tersebut juga berkaitan dengan kemampuan penyelenggara dalam menerapkan prosedur keamanan pangan secara konsisten. Beckstead et al. (2022) menunjukkan bahwa penyelenggara makanan sekolah menghadapi berbagai kendala dalam pengendalian keamanan pangan, termasuk keterbatasan peralatan untuk mempertahankan suhu makanan selama pelayanan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya, kepatuhan terhadap prosedur, serta pengawasan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program makanan berskala besar. Pada konteks Indonesia, penelitian terbaru mengenai program makanan sekolah gratis juga menegaskan bahwa pengendalian risiko keamanan pangan membutuhkan penguatan tata kelola, kapasitas teknis, dan pengawasan pada seluruh rantai penyediaan makanan (Surendra et al., 2026).

Dalam Program MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki posisi strategis karena berperan dalam proses penyediaan dan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Oleh sebab itu, pelaksanaan program perlu dilihat tidak hanya dari aspek ketersediaan makanan, tetapi juga dari kualitas menu, porsi, kebersihan, keamanan, serta proses distribusinya. Pelaksanaan tersebut juga membutuhkan koordinasi antarpihak agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Studi mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Indonesia menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan gizi (Herawati & Sunjaya, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, masih penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan MBG oleh SPPG dipersepsikan oleh masyarakat, khususnya dalam aspek keamanan dan kualitas pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap pelaksanaan MBG, manfaat program, menu dan porsi makanan,



kualitas, serta keamanan pangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan MBG oleh SPPG dan menjadi masukan untuk meningkatkan keamanan serta kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

TINJAUAN PUSTAKA

1). Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan intervensi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, terutama kelompok anak usia sekolah. Program makanan sekolah pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan, tetapi juga dapat menjadi instrumen kebijakan untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kesiapan anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pangan dan gizi perlu mempertimbangkan permasalahan ketahanan pangan karena kondisi ketidakamanan pangan memiliki hubungan dengan berbagai bentuk masalah gizi pada anak. Studi sistematis Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengalami ketidakamanan pangan memiliki risiko lebih besar terhadap kejadian stunting pada anak.

Peran program makanan bergizi menjadi semakin penting karena pemenuhan gizi tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan stunting. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa stunting merupakan permasalahan multidimensional yang membutuhkan pendekatan terpadu, termasuk intervensi gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, serta keterlibatan berbagai sektor (Lameky, 2024).

Oleh karena itu, MBG perlu dilaksanakan secara terencana agar makanan yang diberikan tidak hanya tersedia, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan manfaat kesehatan bagi penerima.

2). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

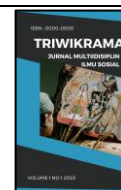
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit pelaksana yang memiliki peranan penting dalam proses penyediaan makanan pada program MBG. Pelaksanaan program makanan dalam skala besar membutuhkan pengelolaan yang baik, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Dengan demikian, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan program dapat tercapai.

Pengalaman dari program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi gizi dipengaruhi oleh faktor operasional dan kapasitas pelaksana di lapangan. Evaluasi terhadap program makanan tambahan di Sulawesi Barat menekankan pentingnya evaluasi implementasi untuk mengetahui hambatan dan kinerja program dalam mendukung perbaikan gizi anak (Muslimin et al., 2026).

Hal tersebut relevan dengan pelaksanaan MBG karena keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan unit pelaksana dalam mengelola sumber daya dan menjalankan prosedur secara konsisten.

3). Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Makanan yang memiliki kandungan gizi baik tetap dapat menimbulkan risiko



kesehatan apabila proses pengolahan, penyimpanan, atau distribusinya tidak memenuhi prinsip keamanan pangan. Oleh sebab itu, keamanan pangan perlu diterapkan pada seluruh rantai penyediaan makanan.

Dalam program makanan sekolah, pengendalian keamanan pangan menjadi semakin penting karena penerima manfaat merupakan kelompok anak yang perlu mendapatkan perlindungan dari risiko penyakit bawaan makanan. Selain faktor bahan pangan, praktik higiene, sanitasi, pengendalian suhu, serta fasilitas pendukung merupakan bagian dari pengelolaan keamanan pangan. Penyelenggara makanan sekolah juga dapat menghadapi kendala operasional yang memengaruhi penerapan keamanan pangan, sehingga diperlukan sumber daya dan prosedur yang memadai.

Dengan demikian, keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG dapat dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat aman dikonsumsi sejak bahan baku diterima sampai makanan didistribusikan. Aspek tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelaksanaan program.

4). Kualitas Makanan

Kualitas makanan dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan rasa dan tampilan makanan, tetapi juga mencakup kandungan gizi, kesesuaian porsi, variasi menu, kesegaran bahan, serta kondisi makanan ketika diterima oleh penerima manfaat. Makanan yang berkualitas diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus dapat diterima oleh penerima manfaat.

Pemenuhan kualitas makanan juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Dewi et al. (2024) menemukan bahwa ketahanan pangan rumah tangga berhubungan dengan status gizi anak, sehingga penyediaan makanan bergizi dapat dipandang sebagai salah satu bagian dari upaya memperkuat pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.

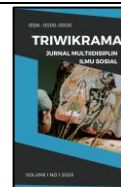
Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidakamanan pangan berhubungan dengan peningkatan risiko stunting dan berbagai bentuk malnutrisi pada anak di Indonesia (Sutrisno et al., 2026).

5). Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan MBG dapat dianalisis menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh pelaksana di lapangan. Dalam penelitian ini, model implementasi George C. Edwards III digunakan untuk melihat pelaksanaan MBG melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai program disampaikan kepada pelaksana dan penerima manfaat. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, bahan pangan, dan sarana pendukung. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur, dan mekanisme kerja. Penelitian terbaru mengenai implementasi kebijakan di Indonesia menggunakan model Edwards III dan menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Habsana et al., 2026).

Kerangka tersebut relevan digunakan untuk menganalisis MBG karena pelaksanaan program melibatkan banyak pihak dan tahapan. Setiap kelemahan dalam komunikasi, keterbatasan sumber



daya, rendahnya komitmen pelaksana, maupun ketidakteraturan struktur birokrasi dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Bahkan, kajian implementasi MBG di wilayah 3T menunjukkan bahwa integrasi data penerima, keterbatasan sumber daya, partisipasi pemasok lokal, transparansi, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan program (Nariyah & Darwanto, 2026).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya berkaitan dengan keamanan dan kualitas pangan serta tanggapan masyarakat terhadap program tersebut. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian diperoleh dalam bentuk jawaban responden yang dapat dikategorikan, dihitung, dan disajikan dalam bentuk frekuensi serta persentase. Dalam penelitian survei, penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti memperoleh data yang terstruktur mengenai karakteristik, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu fenomena (Mellinger & Hanson, 2021).

1). Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran kondisi dan tanggapan responden mengenai pelaksanaan MBG tanpa memberikan perlakuan atau intervensi kepada responden. Survei dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, opini, maupun perilaku suatu kelompok berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian (Corr et al., 2023).

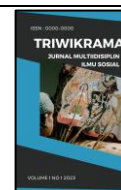
Dalam penelitian ini, aspek yang diamati meliputi pelaksanaan program MBG, manfaat program, kualitas menu dan porsi makanan, keamanan makanan, serta tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Data yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menggambarkan kecenderungan penilaian responden terhadap aspek-aspek tersebut.

2). Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program MBG. Sampel penelitian merupakan sebagian anggota populasi yang dipilih sebagai responden untuk memberikan informasi melalui kuesioner, sebanyak 50 orang. Teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi dan jangkauan penelitian. Pemilihan responden perlu dilakukan secara jelas agar karakteristik sampel dapat dijelaskan dan hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat. Dalam penelitian survei, aspek sampling, karakteristik responden, dan tingkat respons merupakan bagian penting yang perlu dilaporkan secara transparan (Latour et al., 2021).

3). Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan MBG, manfaat program, menu dan porsi makanan, kualitas makanan, keamanan pangan, serta tanggapan responden terhadap pelaksanaan program. Penggunaan kuesioner perlu memperhatikan kejelasan



pertanyaan, kesesuaian pertanyaan dengan tujuan penelitian, serta validitas dan reliabilitas instrumen agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan (Kishore et al., 2021).

Selain data primer, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran artikel dan literatur yang relevan dengan MBG, SPPG, keamanan pangan, kualitas makanan, dan gizi. Penggunaan data sekunder berfungsi sebagai informasi pendukung dalam memahami permasalahan dan menginterpretasikan hasil penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data perlu disesuaikan dengan karakteristik pertanyaan penelitian dan jenis data yang diperlukan (Tang, 2021).

4). Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator penelitian. Indikator tersebut mencakup: (1) pelaksanaan Program MBG, (2) keamanan pangan, (3) kualitas makanan, (4) tantangan dalam pelaksanaan program, dan (5) tanggapan masyarakat. Penyusunan instrumen dilakukan dengan mengacu pada tujuan penelitian dan konsep yang digunakan sehingga setiap pertanyaan memiliki keterkaitan dengan variabel atau aspek yang diteliti. Pengembangan instrumen survei yang sistematis penting untuk meningkatkan kualitas data serta mengurangi kemungkinan pertanyaan yang ambigu atau tidak sesuai dengan konstruk penelitian (Aithal & Aithal, 2020).

5). Teknik Analisis Data

Data hasil kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif, terutama frekuensi dan persentase. Setiap jawaban responden dikelompokkan berdasarkan pilihan jawaban, kemudian dihitung jumlah dan persentasenya. Hasil perhitungan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif agar kecenderungan tanggapan responden dapat dipahami dengan mudah. Statistik deskriptif sesuai digunakan ketika penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai distribusi jawaban responden tanpa melakukan pengujian hubungan atau pengaruh antarvariabel (Latour et al., 2021).

Persentase setiap kategori jawaban dapat dihitung menggunakan rumus:

$$P = (f/N) \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase jawaban responden

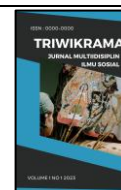
f = frekuensi responden pada setiap kategori jawaban

N = jumlah seluruh responden

Hasil analisis kemudian digunakan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat menilai pelaksanaan MBG, terutama dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, manfaat program, serta pelaksanaan oleh SPPG.

6). Etika Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada responden mengenai tujuan penelitian dan penggunaan data yang diberikan. Identitas responden dijaga kerahasiaannya dan data yang diperoleh digunakan untuk kepentingan penelitian. Dalam penelitian berbasis survei, transparansi mengenai instrumen, proses pengumpulan data, dan



analisis diperlukan agar penelitian dapat dipahami dan direplikasi secara lebih baik (Latour et al., 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1). Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh SPPG

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa program ini merupakan bentuk intervensi yang diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran penting dalam memastikan makanan tersedia dan dapat diterima oleh sasaran program. Pelaksanaan tersebut mencakup proses penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil kuesioner, responden memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan program, sedangkan [jumlah/persentase] responden memberikan tanggapan kurang positif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG telah mendapatkan respons yang cukup baik dari masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

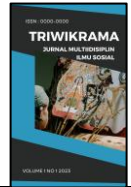
Pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan nyata. Dalam perspektif implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Habsana et al. (2026) menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, pelaksanaan MBG membutuhkan koordinasi yang baik antara SPPG, sekolah, pemerintah, dan pihak lain yang terlibat.

2). Penerapan Keamanan Pangan dalam Pelaksanaan MBG

Keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan MBG karena makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil kuesioner, aspek keamanan pangan memperoleh tanggapan baik dengan Sebagian besar responden menyatakan setuju dengan program MBG.

Keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kondisi makanan ketika sampai kepada penerima, tetapi juga mencakup keseluruhan proses penyediaannya. Pemilihan bahan baku, kebersihan peralatan, higiene penjamah makanan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip keamanan pangan. Penelitian Msimango et al. (2023) menunjukkan bahwa pangan yang digunakan dalam program pemberian makanan di sekolah dapat memiliki risiko kontaminasi mikrobiologis apabila praktik keamanan pangan belum diterapkan secara optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan keamanan pangan perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada tahap akhir sebelum makanan diberikan kepada penerima.

Selain itu, pengendalian suhu dan kondisi penyimpanan menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan makanan. Beckstead et al. (2022) menemukan bahwa penyelenggara makanan sekolah menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan praktik keamanan pangan, termasuk keterbatasan fasilitas dan pengendalian suhu makanan. Hal tersebut relevan dengan pelaksanaan MBG karena makanan harus melewati beberapa tahapan sebelum diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.



3). Kualitas Makanan dalam Program MBG

Selain keamanan, kualitas makanan merupakan aspek yang menentukan keberhasilan program. Kualitas makanan dalam penelitian ini dilihat melalui beberapa aspek, antara lain menu, porsi, variasi makanan, kondisi makanan, rasa, serta kesesuaian makanan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil kuesioner, Sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas makanan yang diberikan melalui program MBG baik. Sementara itu, Sebagian responden memberikan penilaian terhadap aspek kondisi makanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas makanan menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan program.

Makanan yang diberikan dalam program gizi tidak cukup hanya memenuhi standar kuantitas. Makanan juga perlu memiliki kandungan gizi yang sesuai serta dapat diterima oleh penerima manfaat. Dewi et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan antara ketahanan pangan rumah tangga dan kejadian stunting pada anak di Indonesia. Hal tersebut memperkuat pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi.

Dengan demikian, kualitas makanan dalam MBG sebaiknya tidak hanya dinilai dari tampilan atau rasa, tetapi juga dari kesesuaian menu dengan kebutuhan gizi, ukuran porsi, keamanan bahan, serta kondisi makanan ketika diterima oleh penerima manfaat.

4). Tantangan SPPG dalam Menjaga Keamanan dan Kualitas Pangan

Pelaksanaan MBG dalam skala besar tentu menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil penelitian, tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan fasilitas, pengendalian suhu, distribusi makanan, ketersediaan bahan, kebersihan, ketepatan waktu, dan koordinasi.

Keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi kemampuan SPPG dalam mempertahankan keamanan dan kualitas makanan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga tenaga kerja, peralatan, fasilitas penyimpanan, sarana distribusi, dan bahan pangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SPPG menjadi penting agar standar penyediaan makanan dapat diterapkan secara konsisten.

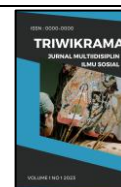
Surendra et al. (2026) menekankan bahwa pelaksanaan program makanan sekolah di Indonesia membutuhkan penguatan pengelolaan risiko keamanan pangan. Risiko dapat muncul pada berbagai tahapan rantai penyediaan makanan sehingga pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan keamanan pangan dalam MBG tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemeriksaan makanan pada saat akan didistribusikan.

5). Tanggapan Masyarakat terhadap Program MBG

Tanggapan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam melihat penerimaan terhadap pelaksanaan MBG. Berdasarkan hasil kuesioner, Sebagian besar responden menyatakan sangat mendukung pelaksanaan program, sedangkan beberapa diantaranya memberikan tanggapan menyetujui.

Tanggapan positif masyarakat dapat menunjukkan bahwa program dianggap memiliki manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi penerima manfaat. Namun, tanggapan masyarakat juga dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui kekurangan program, khususnya terkait menu, porsi, rasa, kebersihan, keamanan, dan ketepatan distribusi.

Dengan demikian, evaluasi terhadap MBG perlu melibatkan penerima manfaat dan masyarakat. Masukan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program



sehingga makanan yang diberikan tidak hanya tersedia, tetapi juga aman, berkualitas, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan penerima.

PEMBAHASAN UMUM

Secara keseluruhan, pelaksanaan MBG oleh SPPG dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Pelaksanaan program, keamanan pangan, kualitas makanan, sumber daya, dan tanggapan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang berhasil disalurkan, tetapi juga oleh kualitas proses sejak bahan pangan diperoleh sampai makanan dikonsumsi.

Hasil Kuesioner

Jumlah responden: 50 orang

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Program MBG memberikan manfaat bagi penerima	20 (40%)	22 (44%)	6 (12%)	2 (4%)	0 (0%)
2	Pelaksanaan MBG oleh SPPG sudah berjalan dengan baik	16 (32%)	25 (50%)	7 (14%)	2 (4%)	0 (0%)
3	Makanan yang diberikan memiliki porsi yang sesuai	14 (28%)	24 (48%)	8 (16%)	4 (8%)	0 (0%)
4	Menu makanan yang diberikan cukup beragam	12 (24%)	23 (46%)	10 (20%)	5 (10%)	0 (0%)
5	Makanan yang diberikan memiliki kualitas yang baik	15 (30%)	25 (50%)	7 (14%)	3 (6%)	0 (0%)
6	Kebersihan makanan sudah terjaga	17 (34%)	24 (48%)	7 (14%)	2 (4%)	0 (0%)
7	Makanan yang diberikan aman untuk dikonsumsi	16 (32%)	26 (52%)	6 (12%)	2 (4%)	0 (0%)
8	Penyimpanan dan pengemasan makanan sudah baik	13 (26%)	24 (48%)	9 (18%)	4 (8%)	0 (0%)
9	Distribusi makanan dilakukan dengan baik dan tepat waktu	14 (28%)	23 (46%)	8 (16%)	5 (10%)	0 (0%)
10	Saya mendukung keberlanjutan Program MBG	22 (44%)	23 (46%)	4 (8%)	1 (2%)	0 (0%)

Keterangan:

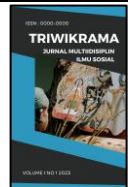
SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; TS = Tidak Setuju; STS = Sangat Tidak Setuju.

Ringkasan Hasil

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan Program MBG. Misalnya, pada pernyataan mengenai keamanan makanan, 32% responden sangat setuju dan 52% setuju, sehingga secara keseluruhan 84% responden memberikan tanggapan positif.

Pada aspek kualitas makanan, 80% responden memberikan jawaban sangat setuju atau setuju. Sementara itu, aspek variasi menu memperoleh persentase positif sebesar 70%, yang menunjukkan bahwa variasi menu masih menjadi salah satu aspek yang dapat ditingkatkan. Dukungan terhadap keberlanjutan program juga cukup tinggi. Sebanyak 90% responden menyatakan sangat setuju atau setuju bahwa Program MBG perlu dilanjutkan.

Temuan tersebut sejalan dengan perspektif implementasi kebijakan yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks MBG, komunikasi diperlukan untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan prosedur; sumber daya diperlukan untuk mendukung penyediaan makanan; disposisi diperlukan agar pelaksana memiliki komitmen terhadap standar program;



sedangkan struktur birokrasi diperlukan agar pembagian tugas dan pengawasan berjalan dengan jelas.

Oleh karena itu, peningkatan pelaksanaan MBG perlu diarahkan pada penguatan kapasitas SPPG, peningkatan pengawasan keamanan pangan, pemenuhan fasilitas pendukung, evaluasi kualitas menu dan porsi, serta penguatan koordinasi dengan sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan tersebut penting agar tujuan MBG dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kualitas pangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat. Program MBG dinilai memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan makanan dan gizi penerima manfaat serta mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan dan pencegahan masalah gizi. Dalam pelaksanaannya, SPPG memiliki peran penting dalam memastikan proses penyediaan makanan berjalan mulai dari pemilihan bahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Keberhasilan pelaksanaan tersebut membutuhkan koordinasi antara SPPG, sekolah, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.

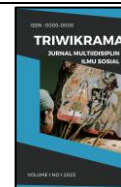
Aspek keamanan pangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Kebersihan makanan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, serta distribusi perlu diperhatikan untuk memastikan makanan aman dikonsumsi. Selain keamanan, kualitas makanan juga menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan kandungan gizi, porsi, variasi menu, rasa, dan kondisi makanan ketika diterima oleh penerima manfaat. Meskipun pelaksanaan program secara umum mendapat respons positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti variasi menu, ketepatan distribusi, pengendalian penyimpanan, ketersediaan fasilitas, serta konsistensi penerapan standar keamanan pangan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan diperlukan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan SPPG dalam memastikan makanan tersebut bergizi, aman, berkualitas, dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

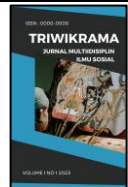
- 1) **Bagi SPPG**, perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi agar keamanan dan kualitas pangan tetap terjaga.
- 2) **Bagi pengelola program**, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap menu, porsi, kandungan gizi, rasa, dan variasi makanan agar makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga dapat diterima oleh penerima manfaat.
- 3) **Dalam aspek keamanan pangan**, diperlukan peningkatan penerapan higiene dan sanitasi, pengendalian suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, serta pengawasan terhadap bahan pangan untuk mengurangi risiko kontaminasi makanan.
- 4) **Bagi pemerintah dan pihak terkait**, perlu memberikan dukungan berupa fasilitas, sumber daya manusia, sarana distribusi, serta pelatihan kepada pengelola SPPG agar mampu memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan secara konsisten.



- 5) **Bagi sekolah dan masyarakat**, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan melaporkan apabila terdapat permasalahan terkait kualitas, kebersihan, keamanan, porsi, maupun distribusi makanan.
- 6) **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian dapat dikembangkan dengan jumlah responden yang lebih besar dan lokasi penelitian yang lebih beragam. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran untuk menggali lebih mendalam mengenai pengalaman SPPG, penerima manfaat, sekolah, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aithal, A., & Aithal, P. S. (2020). Development and validation of survey questionnaire & experimental data: A systematical review-based statistical approach. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, 5(2), 233-251. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4179499>
- Beckstead, E., Jones, M., Spruance, L. A., & Patten, E. V. (2022). School nutrition professionals' experiences with food safety and special diets in school meals during the initial COVID-19 pandemic. *Journal of Food Protection*, 85(2), 188-195. <https://doi.org/10.4315/JFP-21-106>
- Dewi, P., Khomsan, A., & Dwiriani, C. M. (2024). The household food security and stunting of under-five children in Indonesia: A systematic review. *Media Gizi Indonesia*, 19(1), 17-27. <https://doi.org/10.20473/mgi.v19i1.17-27>
- Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D. (2026). Implementation challenges of Indonesia's electronic-based government system: An Edwards III perspective. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*. <https://doi.org/10.18196/jpk.v7i2.29243>
- Kishore, K., Jaswal, V., Kulkarni, V., & De, D. (2021). Practical guidelines to develop and evaluate a questionnaire. *Indian Dermatology Online Journal*, 12(2), 266-275. https://doi.org/10.4103/idoj.IDOJ_674_20
- Lameky, V. Y. (2024). Stunting in Indonesia: Current progress and future directions. *Journal of Healthcare Administration*, 3(1), 82-90. <https://doi.org/10.33546/joha.3388>
- Latour, J. M., Haines, C., & others. (2021). How to do and report survey studies robustly: A helpful mnemonic SURVEY. *Nursing in Critical Care*. <https://doi.org/10.1111/nicc.12669>
- Mellinger, C. D., & Hanson, T. A. (2021). Methodological considerations for survey research: Validity, reliability, and quantitative analysis. *Linguistica Antverpiensia*, 19. <https://doi.org/10.52034/lanstts.v19i0.549>
- Msimango, T., Duvenage, S., Du Plessis, E. M., & Korsten, L. (2023). Microbiological quality assessment of fresh produce: Potential health risk to children and urgent need for improved food safety in school feeding schemes. *Food Science & Nutrition*, 11(9), 5501-5511. <https://doi.org/10.1002/fsn3.3506>



- Mulyaningsih, T., Mohanty, I., Widyaningsih, V., Gebremedhin, T. A., Miranti, R., & Wiyono, V. H. (2021). Beyond personal factors: Multilevel determinants of childhood stunting in Indonesia. *PLOS ONE*, 16(11), e0260265. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260265>
- Muslimin, I., Fajriana, H., Salim, A., Salaka, S. A., & Amin, E. (2026). Implementation evaluation of a local food based supplementary feeding program to support child nutrition in West Sulawesi, Indonesia. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.30867/action.v11i1.3089>
- Nariyah, H., & Darwanto. (2026). Policy analysis of the free nutritious meal program in schools: A case study of six-month implementation in Nduga Regency, Papua Pegunungan. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 7(4). <https://doi.org/10.59784/glosains.v7i4.908>
- Sutrisno, R., Fatmawati, I. D., Laksono, A. D., Rahmawati, W., Wirawan, N. N., & Handayani, D. (2026). The role of household food insecurity in malnutrition among Indonesian children under 5 years of age: A systematic review and meta-analysis (2015-2025). *Public Health Nutrition*, 29(1), e86. <https://doi.org/10.1017/S1368980026102365>
- Tang, H. (2021). Research data and method selection. In *Engineering research*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119624547.ch4>